

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Isu perubahan iklim (*climate change*) menjadi salah satu isu penting yang dibahas oleh masyarakat internasional sejak awal tahun 1990-an melalui UNFCCC dan Protokol Kyoto. Setelah mengalami kekeringan dan gelombang panas yang terus menerus, pemerintah Australia pun memutuskan untuk turut andil dalam upaya dunia tersebut dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada Desember 2007. Pemerintah Australia bertujuan untuk mengurangi gas emisi di Australia sebesar 5% pada tahun 2020. Pada masa pemerintahan PM Julia Gillard mulai diterapkan kebijakan *carbon tax* (pajak karbon) sejak tanggal 1 Juli 2012, dimana lebih dari 500 perusahaan penghasil gas emisi terbesar di Australia harus membayar US\$23 setiap satu ton gas rumah kaca yang mereka hasilkan pada tahun pertama sebelum nantinya bertransisi menuju skema *cap and trade*¹.

Kebijakan pajak karbon kemudian menimbulkan protes keras dari berbagai kalangan kelompok bisnis di Australia karena menyebabkan terjadinya lonjakan kenaikan harga produksi barang yang berdampak pada kenaikan standar hidup masyarakat dan lesunya perekonomian di Australia. Pada pemilihan pemerintahan yang baru tahun 2013, Partai Liberal Australia yang

¹ Skema *cap and trade* merupakan skema dimana apabila sebuah perusahaan mampu mengurangi emisi dari batas yang ditentukan (*cap*) maka izin/*permits* dari sisa emisi total yang dibatasi kemudian dapat dijual (*trade*) kepada perusahaan lain yang tidak dapat melakukan pengurangan.

diketuai Tony Abbott justru mengusung kebijakan utama untuk menghapus *carbon tax* sebelum berpindah menuju skema *Direct Action Plan*. Hingga akhirnya *carbon tax* di Australia secara resmi dihapuskan pada tanggal 17 Juli 2014 di Australia.

Melihat posisi Australia sebagai salah satu negara industri yang menyumbangkan gas emisi rumah kaca terbesar, pemerintah Australia justru menghapus kebijakan *carbon tax*. Tindakan yang diambil oleh pemerintahan Tony Abbott ini dipandang kontroversial dikarenakan bertolak belakang dengan tujuan pengurangan gas emisi rumah kaca di Australia. Kebijakan menghapuskan *carbon tax* ini pun menuai banyak kritikan dari masyarakat internasional karena itu artinya Australia justru keluar dari upaya internasional untuk mengurangi emisi dunia. Apabila dilihat, kasus Australia tersebut hampir sama ketika AS di bawah pemerintahan George W. Bush menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto demi melindungi perekonomian AS. Penulis tertarik untuk menganalisa apakah pengambilan keputusan ini tidak terlepas dari kepentingan para pengusaha dan industri yang diwakili oleh asosiasi bisnis besar dalam melobi pemerintah untuk menghapuskan kebijakan *carbon tax* tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh Kelompok Bisnis Dalam Penghapusan Kebijakan *Carbon Tax* (Pajak Karbon) di Australia Pada Tahun 2014”**.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan *carbon tax* di Australia, mekanisme penerapannya, serta implikasinya terhadap perusahaan dan industri di Australia.
2. Mengetahui profil kelompok bisnis besar di Australia yang memiliki pengaruh terutama dalam penghapusan kebijakan *carbon tax*.
3. Menganalisa upaya-upaya yang diambil oleh kelompok bisnis untuk mempengaruhi penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia.

C. Latar Belakang

Isu perubahan iklim (*climate change*) menjadi isu yang sangat kontroversial bagi dunia internasional sejak awal tahun 1990-an. Menurut *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC), *climate change* didefinisikan sebagai suatu perubahan komposisi atmosfer global dan juga variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu yang dapat disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim ini terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pada masa pra industri, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer hanya berkisar 278 ppm. Namun semenjak adanya revolusi industri, berdasarkan data *World Meteorological Organization* (WMO) jumlah ini meningkat tajam hingga mencapai angka tertinggi yaitu 396 ppm pada tahun 2013.

Pada tahun 1992, masyarakat internasional mulai berupaya untuk menghadapi fenomena perubahan iklim ini melalui penandatanganan perjanjian internasional UNFCCC di Rio de Janeiro, Brazil. Dilanjutkan dengan *Conference of Parties* (COP) ketiga di Kyoto, Jepang pada tahun 1997, melalui Protokol Kyoto akhirnya disepakati upaya bersama antara negara-negara industri besar untuk menurunkan tingkat emisi dunia sebesar 5% pada tahun 2008 – 2012. Namun, pada tahun 2001 Presiden Amerika Serikat George W. Bush justru secara terang-terangan menyatakan penolakan ratifikasi protokol tersebut dengan alasan bahwa mekanisme protokol akan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian AS. Dimana pada kenyataannya sebagian besar industri di Amerika Serikat adalah penyumbang potensial emisi karbon dunia.

Awalnya, Australia menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto seperti AS pada awal pembukaan ratifikasi. Padahal di satu sisi, Australia dikenal sebagai salah satu negara penghasil gas emisi terbesar di dunia dibandingkan negara-negara maju lainnya. Hal ini dikarenakan perekonomian Australia ditunjang oleh industri pengolahan pertambangan dan energi yang menghasilkan tingkat emisi tinggi. Namun, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global memberi dampak besar di Australia. Pada tahun 2007, Australia mengalami gelombang panas dan kekeringan terus menerus yang memecahkan rekor hingga di atas 40°C, seperti yang terjadi di Hyden, Australia Barat, dimana temperatur udaranya mencapai

48.9°C.² Oleh karena itu, Australia akhirnya meratifikasi Protokol Kyoto pada Desember 2007 di bawah pemerintahan PM Kevin Rudd, yang kemudian memasukkan perubahan iklim sebagai agenda politik yang penting sepanjang periode tahun 2006-2007. Pada pemerintahan Rudd mulai diperkenalkan *Carbon Pollution Reduction Scheme* (CPRS) dengan sistem *cap-and-trade*.³

Skema perdagangan karbon ini bertujuan untuk mencapai pengurangan 5% emisi gas rumah kaca pada tahun 2020. Namun usulan CPRS ini mendapat hambatan ketika berada di bawah pemerintahan Rudd, hingga akhirnya Julia Gillard menggantikan posisi sebagai perdana menteri yang baru. Baru pada tahun 2011, *the Clean Energy Act*, rangkaian undang-undang yang mengatur tentang skema perdagangan emisi berhasil diloloskan oleh parlemen Australia melalui *Clean Energy Future Plan* (Rencana Energi Bersih Masa Depan).⁴ Legislasi ini kemudian membentuk *Emissions Trading Scheme* (ETS), mekanisme berbasis pasar yang menetapkan batas mutlak pada polusi karbon di Australia.

Lolosnya *Clean Energy Act* di parlemen mengawali diperkenalkannya *carbon tax* (pajak karbon) untuk mengurangi emisi karbon yang tinggi di Australia. Penetapan ini dimulai dengan penetapan harga karbon tetap (*fixed*

² Bureau of Meteorology, "An Exceptionally Hot February in much of Southern and Western Australia," Bureau of Meteorology - Governments of Australia, <http://www.bom.gov.au/climate/current/statements/> (Diakses pada 11 September 2014)

³ Parliament of Australia, "Carbon Pollution Reduction Scheme," Government of Australia, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Browse_by_Topic/ClimateChange/Governance/Domestic/national/cprs, (Diakses pada 3 Februari 2015).

⁴ Department of Climate Change and Energy Efficiency, "Australia's Plan for a Clean Energy Future - Regulation Impact Statement," Government of Australia, <http://ris.dpmc.gov.au/2011/07/21/australia%E2%80%99s-plan-for-a-clean-energy-future-regulation-impact-statement-%E2%80%93-department-of-climate-change-and-energy-efficiency>, (Diunduh pada 28 September 2014)

carbon price) selama tiga tahun pertama sebelum kemudian bertransisi menuju program *cap-and-trade*. Kebijakan ini secara resmi mulai efektif diperkenalkan pada masa pemerintahan PM Julia Gillard sejak tanggal 1 Juli 2012. Dengan adanya pajak karbon tersebut, lebih dari 500 perusahaan penghasil gas emisi terbesar di Australia harus membayar US\$23/ton gas emisi di tahun pertama sebelum meningkat di tahun kedua dan ketiga. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti Uni Eropa yang hanya berkisar antara US\$8.7 sampai US\$12.

Penetapan pajak karbon di Australia kemudian menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan khususnya pengusaha dari sektor industri pertambangan, pabrik baja dan perusahaan energi. Hal ini dikarenakan perusahaan dan industri tersebut harus menanggung biaya pajak yang tinggi. Padahal perusahaan dan industri besar tersebut merupakan penyumbang hampir lebih dari separuh gas emisi di Australia. Menanggapi protes kelompok bisnis ini, Partai Liberal di bawah pimpinan Tony Abbott mengusung janji kampanye untuk menghapuskan kebijakan *carbon tax*. Walaupun kedua partai besar di Australia sama-sama memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas 5% di tahun 2020, namun Partai Liberal berpendapat berbeda. Tony Abbott menyampaikan di dalam bukunya yang berjudul *A Strong Australia*, bahwa penghapusan pajak karbon berada pada daftar teratas di antara sepuluh prioritas perubahan yang akan dilakukan pemerintahan barunya.

Segera setelah resmi diangkat menjadi perdana menteri yang baru tahun 2013, Tony Abbott dengan Partai Liberalnya segera mengajukan penghapusan pajak ini ke parlemen. Tak hanya penghapusan pajak karbon saja, pemerintahan Tony Abbott bahkan berencana menghapus badan pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan perubahan iklim dan skema perdagangan karbon di Australia. Walaupun tindakan Tony Abbott ini mendapatkan tentangan dari Partai Buruh dan Partai Hijau, namun setelah dilakukan pemungutan suara yang sangat ketat di Senat, diperoleh hasil 39 suara setuju melawan 32 suara yang menolak. Akhirnya kebijakan *carbon tax* yang diterapkan oleh pemerintahan Julia Gillard pada tahun 2012 secara resmi dihapuskan pada tanggal 17 Juli 2014 di Australia.⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diajukan pokok permasalahan yaitu “**mengapa terjadi penghapusan kebijakan *carbon tax* (pajak karbon) di Australia?**”

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis berusaha untuk menganalisa proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri (*foreign policy decision making process*) suatu negara. Menurut Jonathan Renshon dan Stanley Renshon (2008), kebijakan luar negeri

⁵ BBC News, “Australia votes to repeal carbon tax,” <http://www.bbc.com/news/world-asia-28339663>, (Diakses pada 3 Februari 2015).

merupakan pilihan-pilihan yang diambil oleh individu, kelompok, dan koalisi yang memberikan dampak terhadap tindakan suatu negara pada level internasional.⁶ Analisa terhadap kebijakan luar negeri bertujuan untuk mengetahui proses yang mengantarkan pada terbentuknya dan apa yang membuat pemimpin negara memutuskan kebijakan tersebut. Dimana dalam proses tersebut, untuk menghasilkan sebuah keputusan kebijakan luar negeri tidak terlepas dari pengaruh aspek-aspek domestik terutama pengaruh dari masyarakatnya seperti organisasi non-pemerintah, media massa dan opini publik.

Oleh karena itu, untuk menganalisa proses pembuatan keputusan kebijakan dalam penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia, maka penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut.

1. *Societal Model*

Menurut David Skidmore dan Valerie M. Hudson (1993), dalam buku mereka yang berjudul *The Limits of State Autonomy: Societal Groups and Foreign Policy Formation*, menganalisa proses pembuatan kebijakan luar negeri terdapat tiga model pendekatan untuk menjelaskan hubungan antara negara dan masyarakat (*state-society relations*). Yang pertama adalah *statist model*, yaitu asumsi bahwa dalam memformulasikan kebijakan luar negeri, pembuatan keputusan berwenang secara penuh diluar pengaruh dari masyarakat. Artinya bahwa pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih kuat dalam mengatur hubungan luar negeri sehingga cenderung

⁶ Dikutip dari Alex Minzt dan Karl DeRouen Jr, *Understanding Foreign Policy Decision Making* (New York: Cambridge University Press, 2010), 1.

mengabaikan peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, *societal approach*, yaitu asumsi dimana kelompok societal di dalam negara memainkan peran dominan dan kontinyu dalam kebijakan luar negeri. Ketiga, *trans-national model*, yaitu asumsi bahwa persamaan kepentingan dan tujuan dalam kelompok masyarakat dapat membentuk koalisi politik melintasi batas wilayah nasional.⁷

Untuk menjelaskan kasus penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia, maka penulis menggunakan model yang kedua yaitu pendekatan societal. Di dalam pendekatan ini terdapat dua model yaitu blok *pluralist* dan blok *social*. Blok pluralis berasumsi bahwa pemimpin politik akan sangat peduli untuk mempertahankan dukungan politik domestik yang sangat tinggi demi mempertahankan dan memaksimalkan pengaruh dan efektifitas dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Sedang blok social mencakup variasi alternatif dari keberagaman blok dalam masyarakat seperti elit, Marxist, korporatis, dan sektoral. Model pendekatan societal ini menekankan pada peran media massa, organisasi non-pemerintah dan bentuk kelompok penekan lainnya di dalam masyarakat yang mampu mengontrol bahkan secara langsung mempengaruhi isu-isu dan isi dari pembuatan kebijakan luar negeri.⁸

Sebagaimana model societal tersebut di atas menekankan pada peran dominan dari masyarakat atau aktor non-pemerintah dalam proses pembuatan keputusan, maka unit analisa pada kasus penghapusan

⁷ Vinsesio Dugis, *Domestic Political Structure and Public Influence on Foreign Policy, A Basic Model*, hal 180-181.

⁸ *Ibid.*

kebijakan *carbon tax* adalah peran kelompok masyarakat bisnis dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Penulis mengasumsikan bahwa Tony Abbott berusaha mempertahankan dukungan dari kelompok masyarakat bisnis di Australia untuk dapat memenangkan pemilu. Apabila Partai Liberal dapat memenangkan pemilu dan menguasai sebagian besar kursi parlemen, maka peluang untuk meloloskan penghapusan kebijakan *carbon tax* semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa, untuk dapat meloloskan penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia, kelompok masyarakat bisnis memberikan dukungan kepada Tony Abbott (Partai Liberal) untuk memenangkan pemilu 2013.

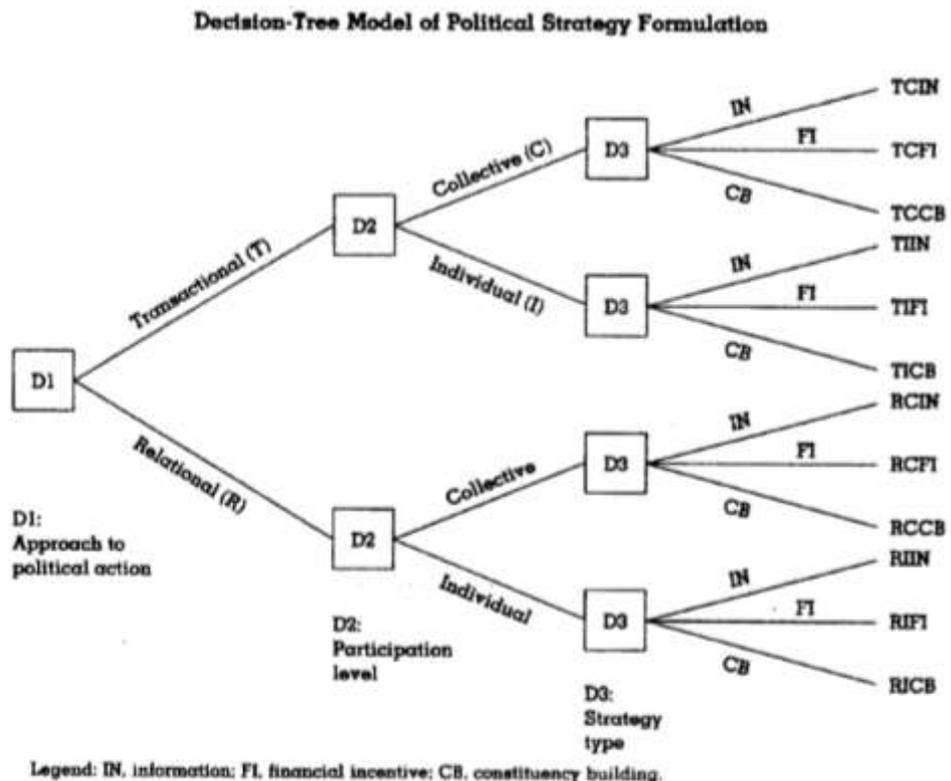
Sehingga dengan adanya dukungan yang diberikan kelompok masyarakat bisnis kepada Partai Liberal, kelompok masyarakat bisnis sebagai kelompok kepentingan dengan bantuan dari asosiasi bisnis dan media massa mampu mengontrol isu politik agar kebijakan *carbon tax* dapat dihapuskan oleh Partai Liberal tersebut.

2. *Decision-Tree Model of Political Strategy Formulation*⁹

Dalam jurnal yang berjudul “*Corporate Political Strategy Formulation : A Model of Approach, Participation, and Strategy Decisions*,” Amy J. Hillman dan Michael A. Hitt (1999) menjelaskan bagaimana perusahaan (*firms*) terlibat dalam perilaku politik untuk mempengaruhi keputusan suatu kebijakan. Dengan menggunakan model seperti di bawah ini mereka menjelaskan bagaimana tindakan politik yang

⁹ Amy J. Hillman dan Michael A. Hitt, *Corporate Political Strategy Formulation : A Model of Approach, Participation, and Strategy Decisions* (Academy of Management Review Vol. 24 No. 4, 1999), 825 – 842.

diambil oleh perusahaan dalam mempengaruhi kekuasaan pemerintah untuk mencapai kepentingan mereka melalui tiga tahapan yaitu : (1) pendekatan terhadap strategi politik, (2) tingkat partisipasi, dan (3) pilihan strategi yang spesifik.



Gambar 1.1. Decision-Tree Model of Political Strategy Formulation

Dalam jurnal tersebut, Hilman dan Hitt mengadopsi *source-based view* (pandangan berdasarkan sumber daya) dimana perusahaan dianggap sebagai sekumpulan sumber daya yang heterogen. Mereka mengasumsikan bahwa perusahaan membuat pilihan-pilihan tindakan politik yang spesifik didasarkan pada sumber daya yang berbeda-beda. Mereka mencontohkan semisal perusahaan yang kaya akan sumber daya lebih memilih untuk mengambil tindakan politik secara individual. Sedangkan perusahaan

dengan sumber daya yang terbatas akan menggunakan tindakan politik secara kolektif.

Pada bagan D1 terdapat dua panah yang menjelaskan pendekatan terhadap tindakan politik yang diambil oleh perusahaan dalam memformulasikan strategi politik yaitu pendekatan *transactional* dan *relational*. Pendekatan *transactional* yaitu dimana perusahaan menunggu perkembangan isu-isu kebijakan penting sebelum membangun strategi guna mempengaruhi isu-isu ini. Sedangkan pendekatan *relational* yaitu perusahaan lebih memilih untuk berusaha membangun hubungan lintas isu dan waktu sehingga ketika isu-isu kebijakan muncul dan mempengaruhi mereka maka mereka sudah siap dengan operasi, kontak, serta sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan.

Untuk menganalisa pendekatan yang diambil, terdapat 3 variabel yang dapat mempengaruhi. Variabel analisa pertama adalah derajat ketergantungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah. Perusahaan pertambangan dan energi merupakan perusahaan yang menghasilkan emisi karbon yang paling tinggi di Australia. Kebijakan mengenai penetapan harga karbon sangat memberikan pengaruh kepada operasi produksi perusahaan. Apabila perusahaan-perusahaan ini mengalami kenaikan biaya dalam hal produksi maka akan memberikan pengaruh kepada perusahaan dalam sektor lain pula karena harga bahan bakar dan listrik yang meningkat. Sehingga perusahaan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai harga karbon tersebut.

Variabel kedua adalah level diversifikasi produk di perusahaan. Bisnis tunggal atau perusahaan terdiversifikasi berdasarkan produk yang terkait perlu memiliki fokus kepentingan yang lebih sempit pada isu-isu politik hanya terbatas pada bidang industrinya saja. Perusahaan dengan fokus bidang kebijakan dapat memusatkan perhatiannya pada serangkaian isu dan regulasi yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang diversifikasi produknya tidak terkait satu sama lain. Semakin diversifikasi produk terkait satu sama lain maka perusahaan akan menggunakan pendekatan relational. Sedangkan apabila diversifikasi produk semakin tidak terkait satu sama lain maka perusahaan akan menggunakan pendekatan transactional.

Pembahasan dalam kasus ini berfokus pada perusahaan pertambangan dan energi di Australia dimana sebagian besar melakukan produksi produk yang sama yaitu pengolahan hasil tambang dan penghasil energi. Sebagai contoh, Perusahaan AGL (Australian Gas Light) yaitu salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Australia, setidaknya memiliki 80 diversifikasi perusahaan yang hampir seluruhnya beroperasi dalam bidang yang sama yaitu pembangkit, pendistribusian, retail energi listrik dan gas alam. Sehingga kebijakan *carbon tax* yang diterapkan pemerintah tidak hanya akan berdampak pada salah satu perusahaan saja tapi keseluruhan perusahaan pula.

Variabel ketiga adalah derajat korporatisme atau pluralisme di dalam sebuah negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Negara dengan

sistem politik korporatis memiliki partisipasi dari kepentingan tertentu yang terlembaga dengan baik (*institutionalized participation*) pada proses kebijakan publik biasanya oleh kelompok bisnis dan buruh. Negara korporatis lebih sering mengadopsi pendekatan relational untuk membangun modal sosial dan menciptakan keluaran akhir yang positif. Di tangan yang lain sistem politik pluralisme dikarakteristikan dengan variasi kelompok kepentingan yang lebih luas yang mampu mempengaruhi keputusan politik pada isu apapun yang diangkat. Negara pluralisme mengadopsi pendekatan transactional karena kompetisi antara kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan berubah secara terus menerus, sehingga membuat perusahaan bertindak lebih selektif.

Di Australia, partisipasi dalam proses demokrasi diwarnai oleh dua partai politik utama yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh. Partai Liberal dikenal dengan rancangan kebijakannya yang mendukung kelompok bisnis, sedangkan Partai Buruh mendukung kelompok buruh atau kalangan menengah ke bawah sesuai dengan nama partainya. Dua partai terbesar inilah yang selalu menduduki mayoritas kursi di parlemen, sehingga kepentingan yang dibawa oleh mereka selalu dapat tersampaikan dengan efektif. Oleh karena itu, berdasarkan tiga variabel di atas, maka pendekatan yang diambil oleh kelompok bisnis di Australia untuk mempengaruhi penghapusan kebijakan *carbon tax* adalah pendekatan relational.

Setelah memutuskan pendekatan yang akan diambil, bagan selanjutnya D2 menjelaskan mengenai tingkat partisipasi yang dilakukan oleh perusahaan berupa *collective* (kolektif) dan *individual*. Aksi individual diartikan sebagai upaya-upaya tunggal yang dilakukan oleh individu-individu atau perusahaan secara individu dalam mempengaruhi kebijakan misalnya suatu perusahaan secara individu melobi pembuat kebijakan. Sedangkan aksi kolektif diartikan sebagai kolaborasi atau kerjasama dari dua maupun lebih individu atau perusahaan dalam proses kebijakan misalnya asosiasi perdagangan dari perusahaan-perusahaan dalam melobi pembuat kebijakan.

Untuk menganalisa tingkat partisipasi mana yang lebih dipilih oleh perusahaan, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi. Perbedaan pertama yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik antara individual dan kolektif adalah perbedaan keperluan sumber daya finansial pada setiap level. Perusahaan dengan sumber daya finansial dan/atau pengetahuan dalam mempengaruhi kebijakan publik yang lebih besar lebih memilih menggunakan partisipasi individual, tanpa memperhatikan pendekatan yang telah dipilih sebelumnya. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya finansial dan/atau pengetahuan dalam mempengaruhi kebijakan publik yang lebih sedikit lebih memilih menggunakan partisipasi kolektif, tanpa memperhatikan pendekatan yang telah dipilih sebelumnya.

Perusahaan pertambangan dan energi besar di Australia yang memiliki sumber daya finansial yang besar serta memiliki pengalaman dalam

melobi pemerintah secara langsung mampu mempengaruhi kebijakan melalui tindakan secara individual. Perusahaan ini mampu memberikan bantuan dana politik pada saat pemilihan umum 2013 untuk mendukung Partai Liberal. Selain itu, perusahaan dapat menyewa seorang pelobi untuk melakukan pendekatan kepada pembuat keputusan di dalam badan pemerintahan.

Derajat korporatisme atau pluralisme negara merupakan variabel lainnya. Pada sistem parlemen korporatis, adanya sentralisasi kekuasaan legislatif mengurangi terbukanya kesempatan bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik dibandingkan sistem yang terbuka bagi tekanan dari individual atau kelompok kepentingan. Sehingga tanpa memperhatikan pendekatan yang telah dipilih, perusahaan akan menggunakan partisipasi kolektif pada negara yang lebih korporatis. Sedangkan di negara pluralisme, perusahaan akan menggunakan partisipasi individual.

Secara umum, pembahasan yang diuraikan disini adalah mengenai kelompok masyarakat bisnis di Australia secara keseluruhan. Sehingga tingkat partisipasi yang diambil di dalam masyarakat tersebut dapat mencakup keduanya. Namun perusahaan-perusahaan ini tidak hanya bergerak secara individual saja, tetapi juga bergabung dalam asosiasi-asosiasi bisnis besar seperti AiGroup, BCA, ACCI, dan MCA. Sehingga melalui asosiasi bisnis ini kelompok masyarakat bisnis di Australia juga bertindak secara kolektif.

Terakhir pada bagan D3, setelah memilih pendekatan relational, kemudian memutuskan tingkat partisipasinya, yang terakhir adalah memilih tipe-tipe strategi dan taktik yang akan diambil. Secara ringkas, Hilman dan Hitt telah merangkum tipe-tipe strategi dan taktik dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Taksonomi Strategi Politik

Strategi	Taktik	Karakteristik
<i>Information strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lobbying</i> - Mendanai proyek penelitian dan melaporkan hasilnya - Bersaksi sebagai saksi mata ahli - Menyuplai <i>position paper</i> atau laporan teknis 	Menarget pembuat keputusan politik dengan memberikan informasi
<i>Financial incentive strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berkontribusi pada politisi atau partai - Honoraria sebagai pembicara - Membayar biaya perjalanan, etc - Jasa personal (mempekerjakan seseorang dengan pengalaman politik atau anggota perusahaan untuk mencalonkan diri untuk dipilih) 	Menarget pembuat keputusan politik dengan memberikan dukungan finansial
<i>Constituency-building strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilisasi akar-rumput dari pekerja, supplier, konstumer, etc - Dukungan melalui iklan - Public relations - Konferensi press - Program pendidikan politik 	Menarget pembuat keputusan politik secara tidak langsung dengan dukungan konstituen

Berdasarkan tabel taksonomi di atas, dapat kita analisa strategi-strategi yang diambil oleh kelompok bisnis Australia untuk mempengaruhi kebijakan melalui tiga strategi, yaitu :

- *Information strategy*. Kelompok bisnis Australia menggunakan taktik *lobbying* dengan menyewa personal *lobbyist* (pelobi) maupun melalui asosiasi bisnis untuk dapat mempengaruhi pembuat keputusan secara langsung. Selain itu, kelompok bisnis juga melakukan berbagai analisa dan survei mengenai dampak *carbon tax* sebagai pertimbangan bagi pentingnya penghapusan kebijakan *carbon tax*.
- *Financial incentives strategy*. Kelompok bisnis Australia memberikan dukungan dana politik bagi Partai Liberal selama masa kampanye agar dapat memenangkan pemilu 2013. Kemudian terdapat pula perwakilan dari kelompok bisnis di dalam parlemen Australia yang dapat membantu memberikan suara dalam proses penghapusan kebijakan *carbon tax*.
- *Constituency-building strategy*. Kelompok bisnis Australia menggunakan mobilisasi demonstran dan media massa, seperti iklan di televisi, internet, dan cetak selain untuk menyatakan dukungan mereka terhadap Partai Liberal serta rencana penghapusan kebijakan *carbon tax*, kelompok bisnis juga bertujuan untuk menarik dukungan masyarakat umum.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia didorong oleh : (1) pertama, adanya faktor internal yaitu tuntutan dan desakan

yang kuat dari kelompok masyarakat bisnis; (2) kedua, upaya-upaya yang dilakukan kelompok bisnis mampu mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas maka penulis memberikan jangkauan pembahasan pada bidang kajian mengenai upaya-upaya kelompok bisnis Australia dalam mempengaruhi penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia pada masa Partai Liberal pimpinan Tony Abbott berkampanye untuk pemilu 2013 hingga memenangkan pemilu dan kebijakan carbon tax dihapuskan pada tahun 2014. Namun penulis juga memberikan tambahan informasi mengenai sejarah awal terbentuknya pajak karbon di Australia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersumber dari *library research* atau studi kepustakaan dengan mengambil sumber dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, seperti buku-buku cetak maupun *e-book*, jurnal ilmiah, media rilis, artikel ilmiah, dan lain sebagainya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian.
- Bab II membahas mengenai ekonomi dan politik kebijakan *carbon tax* yaitu sejarah, mekanisme penerapan, dan implikasinya terhadap perusahaan dan industri di Australia.
- Bab III membahas mengenai profil kelompok bisnis di Australia yang berpengaruh terutama dalam penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia.
- Bab IV membahas mengenai upaya-upaya kelompok bisnis dalam mempengaruhi penghapusan kebijakan *carbon tax* di Australia.
- Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bahasan dalam bab sebelumnya.